

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI DI KELURAHAN AIR MANIS, KECAMATAN PADANG SELATAN

Jurnal Pengembangan Kota (2018)

Volume 6 No. 2 (144–154)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.6.2.144-154

Rizky Dwi Gustina*, Mussadun

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro

Abstrak. Pantai Air Manis merupakan salah satu wisata yang sedang dikembangkan oleh pengelola wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Namun, kondisi dan ketersediaan atraksi maupun fasilitas wisata yang tersedia masih kurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU, dan Dishub sebagai *stakeholder* kunci dan masyarakat lokal sebagai *stakeholder* primer. *Stakeholder* kunci berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam mengelola atraksi, akomodasi, aksesibilitas serta informasi promosi wisata. *Stakeholder* primer berperan sebagai fasilitator dan pelaksana dalam atraksi, akomodasi serta aksesibilitas wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kapasitas yang rendah karena belum mampu mengelola wisata dengan baik. Oleh karena itu, wisata tersebut dikelola oleh masyarakat yang menyebabkan kondisi atraksi serta fasilitas wisata kurang terawat.

Kata kunci: pengelolaan wisata; peran; *stakeholder*

[Title: The Role of Stakeholders in Managing Coastal Tourism in Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan].

Air Manis Beach is one of the tourist destinations developed by Cultural and Tourism Agency (*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*) of Padang City. The conditions and availability of attractions and facilities are still lacking. This study aims to determine the role of stakeholders in the management of Air Manis Beach. The study was conducted with a qualitative descriptive method. Data were obtained through interviews, observation, and document review. The results of the study indicate that there are two categories of stakeholders involved in tourism management, namely Cultural and Tourism Agency (*Dinas Kebudayaan dan Pariwisata*), Public Works Agency (*Dinas Pekerjaan Umum*), and Transportation Agency (*Dinas Perhubungan*) as key stakeholders and local communities as primary stakeholders. Key stakeholders act as coordinators and facilitators in managing attractions, accommodation, accessibility and tourism promotion information. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata has a low capacity because it has not been able to manage tourism properly. Therefore the destination is managed by the community which lead to less maintained condition of attractions and tourist facilities.

Keywords: role; *stakeholder*; destination management

Cara mengutip: Gustina, R. D., & Mussadun. (2018). Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Wisata Pantai di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 6 (2): 144-154. DOI: 10.14710/jpk.6.2.144-154

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas atau jasa lainnya yang disediakan oleh beberapa pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan swasta (Khotimah, Wilopo, & Hakim, 2017). Pariwisata berkontribusi besar dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang, yakni dapat meningkatkan

pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan infrastruktur serta meningkatkan perekonomian wilayah (Begum,

ISSN 2337-7062 © 2018

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2018

*Email: rizky.dwi18@pwk.undip.ac.id

Diterima 14 September 2018, disetujui 20 Desember 2018

Alam, & Siwar, 2014). Pengembangan suatu objek wisata harus memperhatikan lima unsur penting yaitu: daya tarik wisata dan atraksi wisata; fasilitas wisata; infrastruktur dasar sebagai kebutuhan wisatawan; transportasi; dan keramahtamahan masyarakat lokal kepada wisatawan (Spillane, 1994 dalam Kurniawati, Hamid, & Hakim, 2018). Menurut Kuhaja (2014), pariwisata merupakan sektor penting dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi di dunia. Kebijakan pemerintah dalam pariwisata diperlukan untuk menunjang keberhasilan perkembangan dan pertumbuhan pariwisata sehingga dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap pendapatan daerah (Simamora & Sinaga, 2016). Pariwisata diharapkan menjadi sektor penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Sejak era otonomi daerah, daerah diberi kewenangan dalam merencanakan, mengembangkan dan mengelola pariwisata (Satumanatpan, Moore, Lentisco, & Kirkman, 2017).

Peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata yaitu penyediaan fasilitas wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Pemerintah juga dapat melakukan kerjasama dengan *stakeholder* lain, seperti swasta, masyarakat lokal maupun dinas terkait lainnya dalam mengembangkan potensi wisata pantai (Setyaratih, 2013). Selain itu pemerintah yang merupakan pihak fasilitator memiliki peran dan fungsi dalam pembuatan dan penentu seluruh kebijakan terkait pengembangan objek dan daya tarik wisata (Devy & Soemanto, 2017).

Menurut Kuhaja (2014), adanya pariwisata pada suatu daerah dapat membuka kesempatan bagi masyarakat lokal terlibat dalam proses pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Pengembangan pariwisata yang merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan pariwisata juga diharapkan ikut terlibat karena pariwisata merupakan hal yang sangat kompleks sehingga perlu melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat lokal (Rani, 2014). Masyarakat lokal yang merupakan elemen dasar dalam pariwisata karena berperan dalam menyediakan fasilitas pendukung wisata serta memanfaatkan daya tarik wisata yang terdapat pada objek wisata. Selain itu, masyarakat dikatakan memiliki peran utama dalam

pengembangan pariwisata dikarenakan masyarakat sebagai tuan rumah dan akan berinteraksi langsung dengan wisatawan (Muis, 2016). Pemerintah juga memainkan peran penting dalam penyediaan pengembangan pariwisata dalam hal perencanaan, promosi wisata, pembangunan, atraksi wisata, infrastruktur, pendanaan, transportasi dan lain-lain. Sektor swasta juga harus memainkan peran penting dalam mengelola pariwisata sehingga dapat mencapai tujuan pariwisata (Begum, dkk., 2014).

Stakeholder merupakan individu/atau kelompok yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan pengaruh terhadap suatu objek. Peran *stakeholder* sangat dibutuhkan dalam pengembangan kawasan wisata. Jadi sebaiknya dalam peningkatan, pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata tidak hanya dikelola oleh satu pihak saja karena diperlukan keterlibatan pihak lain dalam mengelola wisata (Rahman & Prakoso, 2012). Peningkatan pelayanan terhadap wisatawan merupakan tanggung jawab bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata, seperti pemerintah, pengusaha dari bidang pariwisata maupun masyarakat lokal (Meray, Tilaar, & Takumansang, 2016).

Kota Padang yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat, secara geografis merupakan kota pesisir dan memiliki potensi wisata pantai yang indah dan bersih serta pulau-pulau yang berdekatan dan sektor perikanan. Kota Padang memiliki pesisir pantai membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 68,126 Km dan terdapat 19 pulau-pulau kecil serta memiliki deretan bukit barisan dengan panjang 486,209 Km². Pantai Air Manis Padang berlokasi di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai Air Manis terletak 13 Km dari pusat Kota Padang yang memiliki daya tarik wisata yaitu batu Legenda Malin Kundang.

Pantai Air Manis merupakan salah satu pantai yang terdapat di Kota Padang. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah dan jika air sedang surut para pengunjung wisata dapat berjalan menyusuri bibir pantai sembari menikmati pemandangan laut. Selain itu, pengunjung wisata juga dapat menggunakan motor ATV yang disediakan untuk menyusuri pantai yang berwarna putih kecoklatan.

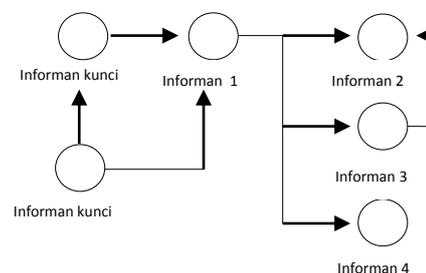
Selain itu pada pantai Air Manis tampak sebuah pulau kecil yang dinamakan Pulau Pisang Kecil, yang dapat dikunjungi dengan berjalan kaki ketika air laut sedang surut. Namun, masih ditemukan beberapa masalah pada wisata Pantai Air Manis, seperti fasilitas yang kurang terawat, masih terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia pada objek wisata, kebersihan dan keamanan. Selain itu pada objek wisata juga belum tersedia areal parkir khusus yang luas menyebabkan pengunjung memarkirkan kendaraan hingga di pesisir pantai sehingga kondisi wisata menjadi tidak tertata (Oktaviana, Bakaruddin, & Putri, 2014). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *stakeholder* kurang berperan dalam pengelolaan wisata, maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui peran *stakeholder* dalam mengelola wisata Pantai Air Manis yang terbagi kedalam dua kategori yaitu *stakeholder* kunci dan *stakeholder* primer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya di Pantai Karang Jahe (Handayani & Warsono, 2017) yang mengeksplorasi peran masing-masing *stakeholder*, penelitian ini akan mengeksplorasi dan mengelompokkan *stakeholder* dalam dua kategori yaitu *stakeholder* primer dan kunci dalam pengelolaan atraksi wisata, akomodasi, aksesibilitas, serta informasi dan promosi wisata. Melalui pengelompokkan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi kebijakan pengembangan kawasan melalui peningkatan peran *stakeholder*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek, dimana pengambilan narasumber dilakukan secara *purposive* dan *snowball* dan analisis data bersifat kualitatif dan menekankan generalisasi. Prinsip teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan menjadi lebih terstruktur dan lebih bermakna (Sugiyono, 2007). Penelitian kualitatif merupakan suatu proses meneliti untuk memahami kompleksitas dalam interaksi manusia dan segala kegiatannya yang merupakan sasaran utama penelitian kualitatif (Marshall, 1995 dalam Sugiyono, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian

untuk mengetahui peran kelembagaan dalam kegiatan wisata Pantai Air Manis pada atraksi, akomodasi, aksesibilitas, serta informasi dan promosi.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan observasi lapangan untuk mengamati objek penelitian secara langsung di lapangan. Data yang diamati yaitu karakteristik wisata Pantai Air Manis yang terdiri dari atraksi, akomodasi, aksesibilitas, serta informasi, dan promosi wisata. Selain itu, data primer juga dikumpulkan dengan wawancara kepada informan yang dijadikan sampel dalam penelitian. Data hasil wawancara direkam atau dicatat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada enam informan yaitu pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, pejabat Kelurahan Air Manis, dan masyarakat lokal Kelurahan Air Manis yang terlibat dalam pengelolaan wisata (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Alur *Snowballing* Wawancara

Data sekunder berupa data yang telah tersedia dan berupa dokumen, teks, dan gambar (Sugiyono, 2007). Data sekunder dikumpulkan dengan cara telaah dokumen, baik dari dokumen dan website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang, buku, artikel, laporan, dan internet terkait objek wisata Pantai Air Manis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing* atau *verification* (Miles dan Huberman, 1992 dalam Sugiyono, 2005). Reduksi data dilakukan untuk menyederhanakan data dan menggolongkan data, sehingga data yang tidak perlu dibuang dan data yang digunakan disusun sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan (Lexy, 2002). Data hasil wawancara

dikategorisasikan berdasarkan sasaran penelitian yaitu mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik objek wisata (atraksi, akomodasi, aksesibilitas, informasi dan promosi), *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata, peran *stakeholder* dalam pengelolaan wisata yang dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* kunci. *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak langsung dari adanya suatu kegiatan dan dilibatkan penuh dalam suatu kegiatan, seperti masyarakat, sedangkan *stakeholder* kunci yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan, seperti dinas ataupun instansi yang berkaitan langsung dengan suatu kegiatan atau rencana (Maryono, 2005 dalam Handayani & Warsono, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Wisata

Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Selain itu, juga terdapat pihak lain seperti masyarakat lokal, Dinas PU dan Dishub yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Masyarakat lokal sebagai *stakeholder* primer karena terlibat dalam pengelolaan wisata dan terkena dampak langsung dari adanya objek wisata, sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU dan Dishub sebagai *stakeholder* kunci karena *stakeholder* tersebut bertanggung jawab dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan terkait objek wisata.

A. Peran *Stakeholder* Kunci dalam Pengelolaan Wisata

Bidang destinasi dan industri pariwisata tersebut terbagi kedalam dua bagian yaitu destinasi dan daya tarik wisata serta usaha dan industri pariwisata. Bidang ini merupakan bidang yang berperan dalam mengelola wisata di Kota Padang, salah satunya yaitu Pantai Air Manis. Bidang ini berperan dalam mengelola destinasi, memelihara destinasi kawasan wisata serta usaha dalam industri pariwisata seluruh objek wisata yang ada di Kota Padang.

“Jadi pengelolaan sendiri itu memang murni dinas pariwisata namun dia bekerja sama dengan masyarakat ketika ada event,.... Lembaganya itu di dinas pariwisata, tidak ada yang lain” (PT/01.77/73)

“Tapi sampai saat ini wisata tersebut dikelola oleh dinas pariwisata bidang destinasi dan industri pariwisata” (PT/01.92/74)

“Bidang destinasi dan industri pariwisata salah satunya yaitu tentang destinasi tentang kawasan objek wisata, disamping usaha. Disitu ada pengelolaan destinasi, pemeliharaan destinasi, ee dibawah bidang destinasi ini ada dua kasi yaitu kasi destinasi dan daya tarik wisata serta kasi usaha dan industri pariwisata.jadi dua kasi ini untuk membantu satu bidang” (PP/01.120/107)

Pada pantai ini terdapat batu Legenda Malin Kundang (lihat Gambar 2), yaitu kisah seorang anak yang durhaka terhadap ibunya yang kemudian dikutuk menjadi batu. Objek wisata Pantai Air Manis dikelola oleh satu pihak yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang berperan sebagai *stakeholder* kunci dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. *Stakeholder* kunci berperan dalam mengelola wisata seperti mengelola atraksi wisata seperti keindahan alam pantai, Pulau Pisang kecil dan Batu Malin Kundang.



Gambar 2. Atraksi Wisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan satu-satunya pihak pengelola wisata Pantai Air Manis. Seharusnya dalam pengelolaan wisata perlu adanya kerja sama dengan pihak swasta dan UPT, namun saat ini pihak pengelola Pantai Air Manis belum mengadakan kerja sama dengan pihak manapun. Saat ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang tengah melakukan diskusi untuk melakukan kerja sama dengan BPJS dalam mengelola wisata Pantai Air Manis. Namun hal tersebut masih dalam tahap pendiskusian sehingga saat ini pengelolaan wisata Pantai Air Manis masih dikelola oleh satu pihak yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.

“Seharusnya swasta dan UPT namun untuk saat ini dikelola oleh dinas sendiri yaitu bidang destinasi dan industri wisata” (PT/01.96/75)

“Kalau ini air manis kita mau kerja sama dengan BPJS” (PP/01.158/109)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang merupakan pengelola dan pihak yang bertanggung jawab atas wisata Pantai Air Manis. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam mengelola wisata. Pertama yaitu kurangnya personil maupun sumber daya manusia dalam mengelola wisata khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena bidang yang mengelola wisata terdiri dari satu Kabid dan dua Kasi. Adanya keterbatasan sumber daya manusia sehingga perlu melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Dengan demikian pihak-pihak tersebut dapat bekerja sama dalam mengelola wisata Pantai Air Manis. Kendala yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan sarana prasarana maupun atraksi di wisata Pantai Air Manis. Seharusnya objek wisata memerlukan atraksi wisata yang dapat menghibur pengunjung, namun saat ini kondisi wisata tersebut masih minim atraksi dan fasilitas wisata. Kendala yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran dalam merealisasikan rencana pengembangan wisata. Berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Tahun 2014-2019, telah terdapat *Detail Engineering Design* kawasan wisata terpadu, salah satunya yaitu Pantai Air Manis dan Batu Malin Kundang. Zonasi kawasan wisata Air Manis telah direncanakan seperti area parkir, area bermain anak-anak, dan lain-lain. Namun rencana tersebut belum direalisasikan karena minimnya anggaran yang tersedia.

“Kendalanya itu terutama karena kita keterbatasan personil/sumber daya manusia, sudah itu fasilitas sarana prasarana di sana itu sangat minim sekali di Air Manis, seharusnya dari segi atraksi, dari segi sarana prasarana kawasan destinasi itu ya memang betul-betul mengadopsi atau menghibur pengunjung/wisatawan, kalau sekarang kan masih kosong, gak ada apa-apa. Selain itu dana yang tersedia juga minim” (PS/01.185/125)

Wisata Pantai Air Manis dikelola oleh satu pihak yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Padang. Namun pihak tersebut tetap bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaannya. Pihak pengelola memberi kebebasan kepada masyarakat lokal untuk membuka usaha dan menyediakan jasa bagi pengunjung wisata. Jika masyarakat ingin membuka usaha maupun jasa maka modal berasal dari masyarakat dan keuntungan yang diperoleh juga diperuntukkan bagi masyarakat. Namun pihak pengelola tetap melakukan kontrol terkait harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha sehingga harga yang ditetapkan merupakan harga standar, tidak terlalu mahal dan tidak berubah-ubah.

“Kita hanya memberikan info terkait harga, misalnya ni harga hari ini 100 ribu, ya ditulis disana 100 ribu, jangan besok-besok berubah lagi harganya jadi 150 ribu, 200 ribu, jadi transparansi harga dari masing-masing pelaku usaha disitu harus ada” (PP/01.167/111)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam mengelola kegiatan wisata Pantai Air Manis yaitu dalam hal biaya masuk dan parkir maupun dalam hal penyediaan fasilitas wisata. Pihak pengelola juga melakukan pemilihan petugas seperti petugas parkir objek wisata. Petugas tersebut 98 merupakan masyarakat asli Kelurahan Air Manis yang dipilih oleh Dinas Pariwisata. Petugas parkir yang terpilih tersebut nantinya akan digaji oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“Dari dinas pariwisata mah, petugasnya tu warga siko tapi urang pariwisata yang mamilih urang siko ko dan beko pariwisata yang manggaji urang petugas tu” (PP/04.64/116) (Dari Dinas Pariwisata, petugasnya itu masyarakat lokal tapi pihak dari Dinas Pariwisata yang memilih masyarakat yang akan dipekerjakan dan nantinya pihak Dinas Pariwisata yang akan menggaji petugas tersebut) “Pintu gerbang itu kan bayar 5 ribu ya sekalian uang parkir juga, jadi itu dari dinas pariwisata yang mengelola” (PP/01.137/108)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berperan dalam menyediakan akses bagi pengunjung menuju lokasi wisata bekerja sama dengan Dinas PU dan Dishub. Dinas PU berperan dalam menyediakan akses jalan sedangkan Dishub menyediakan moda transportasi yang dapat digunakan pengunjung menuju wisata. Dinas Pariwisata mempunyai terobosan yaitu menyediakan bus pariwisata gratis yang dapat

digunakan pengunjung untuk mengunjungi wisata-wisata yang terdapat di Kota Padang, salah satunya yaitu Pantai Air Manis. Bus gratis tersebut disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang bertujuan untuk memperkuat promosi sektor wisata. Selain itu transportasi *online* yang disediakan oleh perusahaan swasta juga dapat digunakan sebagai moda transportasi bagi pengunjung wisata.

“Oo dinas pariwisata itu punya terobosan bus pariwisata untuk keliling kota padang, tapi yang menyediakan aksesnya unuk kesana itu yang terlibat dishub sama PU, kalau PU dari sarana prasarana jalannya, kalau Dishub ya transportasi mobilnya. Jadi dishub+PU yang mengelola moda transportasinya”(PT/01.178/81)

Promosi wisata Pantai Air Manis kegiatan promosi hanya dilakukan oleh pengelola wisata yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Promosi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggunakan media internet seperti *website* dinas, sosial media *facebook* dan *instagram* (lihat Gambar 3). Selain itu promosi juga dilakukan melalui surat kabar, radio maupun baliho yang dipajang di pinggir jalan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang juga mempublikasikan sebuah buku Profil Pariwisata Kota Padang sebagai media informasi terkait pariwisata yang terdapat di Kota Padang, salah satunya yaitu Pantai Air Manis. Namun ketika dinas mengadakan *event-event* tertentu pada hari libur di wisata Pantai Air Manis maka promosi yang dilakukan yaitu dengan menyebarkan pamflet-pamflet *event* ke beberapa daerah seperti Payakumbuh dan Pekanbaru.

“Promosi dilakukan melalui website, kita juga mengadakan ada pergi-pergi ke daerah untuk memberikan pamflet-pamflet event, seperti misalnya jika ada event ini kita serahkan ke payakumbuh, pekanbaru. Selain itu juga disebarkan melalui radio dan surat kabar juga. Situs-situs apa ya jaringan sosial seperti facebook itu juga sebagai media promosi wisata. oiya selain itu juga promosi wisata juga ada dengan baliho juga dipajang dipinggir jalan”(PP/02.60/91)



Gambar 3. Informasi dan Promosi Wisata

B. Peran *Stakeholder* Primer dalam Pengelolaan Wisata

Masyarakat lokal sebagai *stakeholder* primer dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis. Masyarakat lokal juga ikut berperan dalam mendukung maupun mengelola kegiatan wisata yang tersedia (lihat Gambar 4). Pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakat lokal untuk berjualan dan menyediakan jasa pada objek wisata dengan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang tersedia. Masyarakat yang membuka usaha dan menyediakan jasa tersebut merupakan masyarakat asli Kelurahan Air Manis. Pengusaha warung makan dan minum yang terdapat pada objek wisata biasanya memiliki hubungan persaudaraan. Selain itu masyarakat juga diberi kebebasan dalam mengelola fasilitas lainnya seperti musholla, toilet umum/ kamar mandi, gazebo, dan lain sebagainya.

“Iyo masyarakat siko ikuik andil dalam kegiatan yang ado diwisata ko kan karno pantai tu kan ado di kelurahan siko” (PT.03.42/86)

“Ado yang pribadi, tapi ado juo yang bisa dikecek an dari dinas pariwisata ado nolong cuman untuak ko yo masih masyarakat yang mengelola” (PT/04.42/92)

“Iyo kalau yang manggaleh disinan tu emang masyarakat pribumi” (PT/03.29/84)

“Disiko ko yo masih pribadi dari masing-masing masyarakat”(PT/04.74/96)



Gambar 4. Fasilitas Wisata yang dikelola Masyarakat

Masyarakat lokal diikutsertakan ketika pengelola wisata mengadakan *event-event* tertentu saat hari libur seperti pentas seni, belajar bahasa Inggris maupun acara mendongeng anak. Setiap *event* tersebut dapat diikuti oleh seluruh masyarakat kelurahan maupun pengunjung wisata. Selain itu masyarakat diberi kebebasan dalam menyediakan, jasa seperti warung makan, penyewaan motor ATV (Gambar 4). Pada lokasi wisata juga terdapat beberapa penginapan/*homestay* yang disediakan oleh masyarakat lokal bagi pengunjung wisata yang ingin menginap. Pengunjung wisata tidak hanya menggunakan kendaraan pribadi, tetapi juga dapat menggunakan jasa ojek yang disediakan oleh masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat lokal juga menyediakan kios *souvenir* pada objek wisata.

“Kalau dalam mengelola ya itu dari Dinas Ppariwisata tapi kalau ada event tertentu ya tu baru melibatkan masyarakat, dan juga dari masyarakat menyediakan motor atv ya itu bisa digunakan untuk pengunjung, selain itu masyarakat juga berjualan di sekitar objek wisata dan itu semuanya merupakan masyarakat kelurahan air manis” (PT/02/44/58)

“Jadi yang menyediakan homestay ko yo dari masyarakat siko, mungkin kan nyo ado rumah ndak dihuni yo nyo buek lah homestay kayak gitu aa, kadang nyo jadikan investasi se dek inyo gitu kan kayak disewakan untuak apo gitu kan” (PT/04.46/69) (Jadi yang menyediakan homestay ya dari masyarakat lokal, mungkin masyarakat memiliki rumah yang tidak dihuni jadi dibuatlah homestay, kadang dijadikan investasi oleh masyarakat jadi rumahnya bisa disewakan gitu kan)

“Bisa pakai oto pribadi, ojek itu bisa juo. Masyarakat siko juo ado menyediakan jasa ojek gitu untuak pengunjung dari aia manih ka kalua” (KW/03.33/26) (Bisa menggunakan kendaraan pribadi, selain itu juga dapat menggunakan jasa ojek. Masyarakat sini juga menyediakan jasa ojek bagi pengunjung yang ingin keluar)

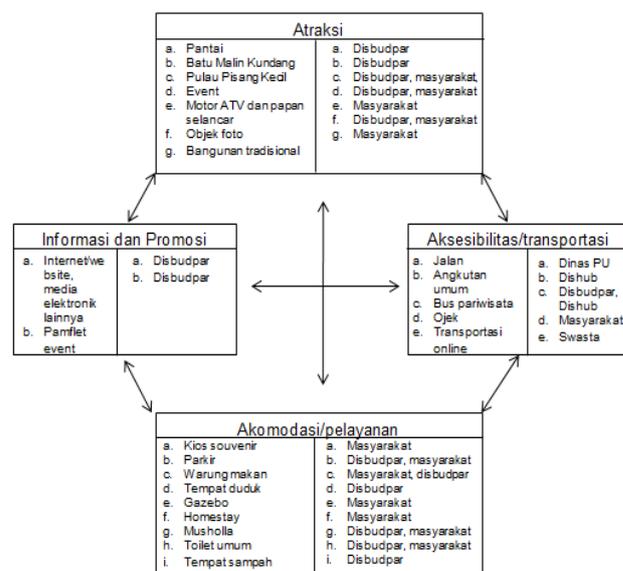
Sebagian besar masyarakat lokal Kelurahan Air Manis mata pencahariannya sebagai pedagang maupun menyediakan jasa pada wisata Pantai Air Manis. Masyarakat lokal sebagian besar telah memiliki motor ATV untuk disewakan. Masyarakat yang menyediakan jasa motor ATV maupun yang

membuka warung makan di lokasi wisata menggunakan modal pribadi dari swadaya masyarakat. Sebagian besar masyarakat pesisir tidak memiliki modal untuk memulai usaha pada objek wisata sehingga masyarakat akan melakukan pinjaman ke *bank*.

“Di objek wisata ada penyewaan motor ATV dan jasa foto di batu malin kundang yang disediakan oleh masyarakat lokal dari swadaya masyarakat sendiri” (KW/02.39/16)

“Kalau itu modal surang diak, swadaya surang, bara bali, umumnya kami minjam di bank syariah, atv ko kan balinyo ado yang duo baleh, ado nan 19 ado nan 25 tapi ntah baa pas tibo siko kan ibaratnyo netto barasiah lah, aa pembayarannyo per bulan, ado nan punyo 3, ado nan punyo 5, ado nan punyo 7, dan ado nan punyo 14 paliang banyak, rato-rato masyarakat siko punyo atv untuak disewakan” (PT/06.91/106) (Kalau itu menggunakan modal sendiri, umumnya kami melakukan pinjaman ke bank syariah, motor ATV itu ada yang harganya dua belas, sembilas belas, ataupun dua puluh lima juta tapi nanti dihitung netto bersih, nah nanti pembayaran ke bank itu perbulan, masayarakat lokal ada yang punya tiga, lima, tujuh dan ada yang memiliki paling banyak 14 motor ATV, jadi rata-rata masyarakat memiliki ATV untuk disewakan)

Adapun *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan wisata baik atraksi, akomodasi, aksesibilitas serta informasi dan promosi dapat dilihat pada Gambar 5.



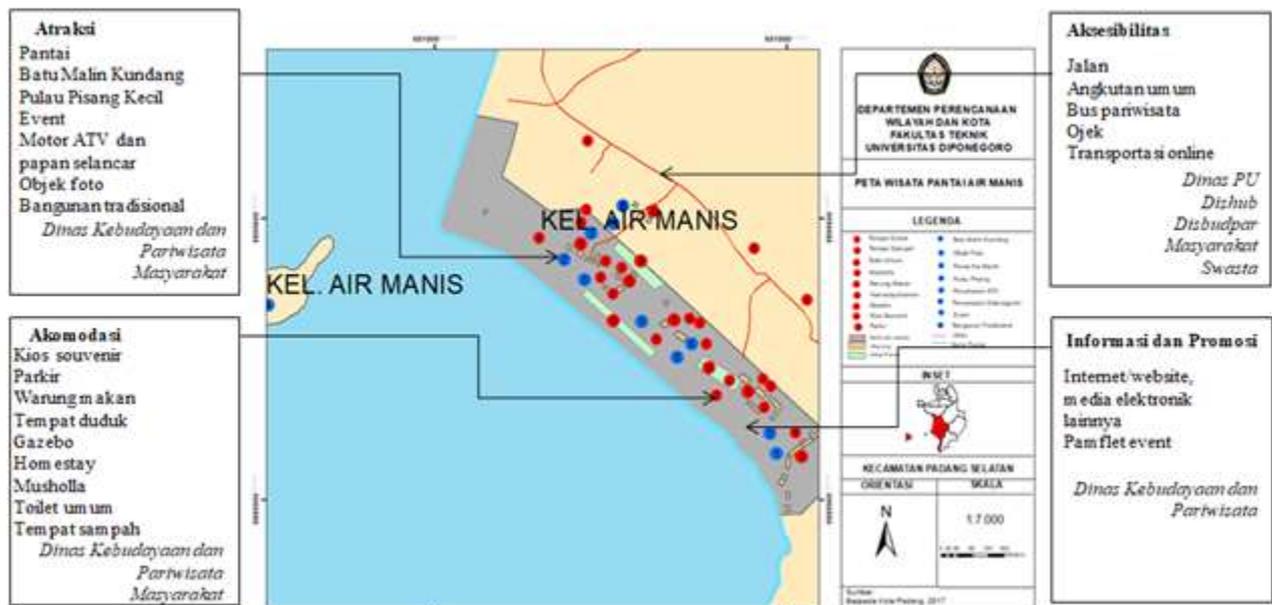
Gambar 5. Stakeholder Pengelolaan Wisata Pantai Air Manis

Stakeholder kunci dalam pengelolaan wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang yang merupakan pengelola dan pihak yang bertanggung jawab atas wisata Pantai Air Manis. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata masih mengalami beberapa kendala dan masalah dalam mengelola wisata. Pertama yaitu kurangnya personil maupun sumber daya manusia dalam mengelola wisata khususnya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang. Kendala yang kedua yaitu kurangnya ketersediaan sarana prasarana maupun atraksi di wisata Pantai Air Manis (lihat Gambar 6).

Kendala yang ketiga yaitu keterbatasan anggaran dalam merealisasikan rencana pengembangan wisata. Diperlukan koordinasi dan keterlibatan antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mengelola wisata. *Stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan objek wisata Pantai Air Manis membutuhkan koordinasi yang baik agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Tabel identifikasi dan peran *stakeholder* dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi dan Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Wisata Pantai Air Manis

| <i>Stakeholder Primer</i> | Peranan/posisi | Peran <i>Stakeholder</i> |
|---------------------------------|----------------|--|
| Masyarakat lokal | Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> • Terlibat sebagai pelaku usaha wisata • Terlibat dalam memanfaatkan objek dan daya tarik wisata • Terlibat sebagai tenaga kerja seperti petugas parkir dan karcis, dan penjaga toilet umum. |
| | Fasilitator | <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dan mengelola atraksi wisata, akomodasi dan fasilitas pendukung wisata lainnya. • Menyediakan jasa seperti jasa ojek, jasa penyewaan ATV dan papan selancar, serta jasa foto. |
| <i>Stakeholder Kunci</i> | Peranan/posisi | Peran <i>Stakeholder</i> |
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Koordinator | <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kebebasan kepada masyarakat lokal dalam memanfaatkan objek dan daya tarik wisata untuk membuka usaha maupun jasa wisata • Melakukan koordinasi terkait harga makanan dan minuman yang dijual oleh masyarakat lokal yang membuka usaha warung makan pada objek wisata. • Memiliki rencana untuk mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola wisata. |
| | Fasilitator | <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan promosi wisata. • Menyediakan atraksi wisata, serta aksesibilitas wisata (bus pariwisata). • Menyediakan informasi dan fasilitas pendukung wisata. • Penyediaan tenaga kerja seperti petugas parkir dan petugas penjaga toilet umum yang berasal dari masyarakat lokal, dan memberikan gaji kepada tenaga kerja tersebut. |
| Dinas PU | Fasilitator | Menyediakan akses jalan menuju objek wisata. |
| Dishub | Fasilitator | Menyediakan moda transportasi menuju objek wisata |



Gambar 6. Peta Stakeholder Pengelolaan Wisata

Berdasarkan penjabaran Tabel 1 dapat diketahui beberapa kendala atau masalah yang dihadapi dalam pengelolaan wisata Pantai Air Manis yang dilakukan oleh *stakeholder*, yaitu kurangnya personil atau sumber daya manusia, kurangnya anggaran yang tersedia, kurangnya ketersediaan sarana prasarana pada objek wisata, serta belum adanya kerjasama antara pengelola wisata dengan pihak swasta dalam mengelola wisata. Seharusnya dalam pengelolaan wisata memerlukan peran *stakeholder* lain seperti pihak swasta dan Pokdarwis. Oleh karena itu, perlu adanya peran *stakeholder* lain seperti pihak swasta, biro perjalanan wisata dan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) ataupun organisasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pada objek wisata agar dapat terlibat dalam mengelola objek wisata.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa objek wisata Pantai Air Manis hanya dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang di bawah bidang destinasi dan industri pariwisata. Pada pengelolaan objek wisata Pantai Air Manis terdapat beberapa *stakeholder*, baik sebagai *stakeholder kunci* dan *stakeholder primer*.

Stakeholder kunci, yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan pengelola wisata, Dinas PU dan Dishub. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan sebagai *stakeholder* kunci, karena bertanggung jawab terhadap objek wisata Pantai Air Manis baik dalam hal perencanaan kawasan objek wisata, membuat kebijakan maupun aturan yang berkaitan dengan objek wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang memberikan kebebasan kepada masyarakat lokal dalam memanfaatkan objek dan daya tarik wisata untuk membuka usaha maupun jasa. Pengelola wisata juga melakukan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat yang membuka usaha warung makan pada objek wisata terkait ketetapan harga. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengelola wisata Pantai Air Manis. Promosi wisata melalui media *website*, media sosial serta media lainnya, penyediaan atraksi, serta aksesibilitas wisata (bus pariwisata) juga disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berperan dalam penyediaan kepada tenaga kerja seperti petugas parkir dan penjaga toilet umum, dan memberikan gaji kepada tenaga kerja tersebut. *Stakeholder* kunci lainnya yaitu Dinas PU dan Dishub, Dinas PU menyediakan akses jalan menuju lokasi wisata, sedangkan Dishub menyediakan moda transportasi yang dapat digunakan pengunjung menuju objek wisata.

Stakeholder primer, yakni masyarakat Kelurahan Air Manis. Masyarakat Kelurahan Air Manis berperan sebagai *stakeholder* primer, karena merupakan pihak yang terlibat secara penuh dalam mengelola wisata yaitu pelaku usaha wisata. Masyarakat yang terlibat dalam memanfaatkan objek dan daya tarik wisata sebagai atraksi wisata maupun akomodasi wisata dapat memperoleh keuntungan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Akomodasi wisata serta jasa ojek juga disediakan oleh masyarakat lokal dengan tujuan untuk memberikan layanan bagi pengunjung wisata. Tenaga kerja seperti petugas parkir dan karcis serta penjaga toilet umum juga berasal dari masyarakat lokal. Masyarakat juga berperan dalam menyediakan atraksi wisata serta jasa ojek yang dapat digunakan oleh pengunjung. Adanya objek wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Oleh karena itu, masyarakat lokal Kelurahan Air Manis termasuk kedalam kategori *stakeholder* sekunder sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari adanya wisata Pantai Air Manis. Peran masyarakat dan pemerintah daerah di dalam pengelolaan wisata di pantai ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya di Pantai Karang Jahe (Handayani & Warsono, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang belum digali dalam penelitian ini karena berbagai keterbatasan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu penelitian ini memberikan rekomendasi agar dilakukan penelitian lanjutan untuk meneliti peran *stakeholder* swasta dalam mengelola kegiatan wisata yang pengelolaannya melibatkan pihak swasta. Pihak swasta juga merupakan pihak yang berperan penting pada objek wisata jika suatu objek wisata terdapat pihak swasta yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Begum, H., Alam, F., & Siwar, C. (2014). Perceptions of Tourists Towards the Role of Stakeholders for Tourism Development. *Current World Environment*, 9(3), 704-712. doi:10.12944/cwe.9.3.19
- Devy, H. A., & Soemanto, R. B. (2017). Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagai Daerah Tujuan Wisata di Kabupaten Karanganyar (Studi Kasus Obyek Wisata Air Terjun Jumog di Kawasan Wisata Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 34-44. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/dilema/article/view/11194/pdf>
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholder dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. 2017, 6(3), 1-13. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16543>
- Khotimah, K., Wilopo, W., & Hakim, L. (2017). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya (Studi Kasus pada Kawasan Situs Trowulan sebagai Pariwisata Budaya Unggulan di Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 41(1), 56-65. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1657/2041>
- Kuhaja, T. (2014). Kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(3), 278-292. doi:10.14710/pwk.v10i3.7785
- Kurniawati, E., Hamid, D., & Hakim, L. (2018). Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 54(1), 8-14. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2211/2607>
- Lexy, J. M. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Meray, J. G., Tilaar, S., & Takumansang, E. D. (2016). Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *SPASIAL*, 3(3), 47-55. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/13429>
- Muis, A. (2016). Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

- (Studi Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten Penajam Paser Utara). *Jurnal Administrasi Negara*, 4 (2), 3988–4001. Retrieved from [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Jurnal%20Muis%20\(06-16-16-07-36-23\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/06/Jurnal%20Muis%20(06-16-16-07-36-23).pdf).
- Oktaviana, Bakaruddin, & Putri, R. E. (2014). Fungsi Pengelola Objek Wisata Pantai Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. *Pendidikan Geografi*, 2(3), 1-7. Retrieved from <http://ejournal-s1.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/geografi/article/view/1957>
- Rahman, N., & Prakoso, H. B. S. E. (2012). Perspektif Stakeholder terhadap Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. 2012, 1(1). Retrieved from <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/53>
- Rani, D. P. M. (2014). Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 412-421. Retrieved from www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpm5b0b20ff16full.pdf
- Satumanatpan, S., Moore, P., Lentisco, A., & Kirkman, H. (2017). An Assessment of Governance of Marine and Coastal Resources on Koh Tao, Thailand. *Ocean & Coastal Management*, 148, 143-157. doi:10.1016/j.ocecoaman.2017.08.001
- Setyaratih, F. (2013). Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Museum (Studi Kasus Museum Sonobudoyo Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1, 11-19. Retrieved from <https://www.e-jurnal.com/2017/03/peran-pemerintah-dalam-mengembangkan.html>
- Simamora, R. K., & Sinaga, R. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 4(1), 79-96. doi:10.31289/jppuma.v4i1.895
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.